

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. DESKRIPSI WILAYAH KABUPATEN BANTUL

1. Kondisi Geografis

Secara administratif, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai lima Kabupaten dan satu Kotamadya, salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bantul. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.⁵⁸

Kabupaten Bantul dilihat dari titik koordinatnya, terletak diantara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur. Untuk lebih memperjelas letak geografis

⁵⁸ http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0401_letak_geografis.html

Kabupaten Bantul diantara Kabupaten/kota di DIY, berikut adalah table letak geografis yang menunjukkan batas wilayah Kabupaten Bantul:

Tabel 2.1

Batas Wilayah Kabupaten Bantul

Arah Mata Angin	Perbatasan Wilayah/daerah
Utara	Berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Selatan	Berbatasan dengan Samudera Indonesia
Timur	Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul
Barat	Berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo

Sumber : <http://www.bantul.go.id>

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km². Dengan luas ini, luas wilayah Kabupaten Bantul 15,90% dari keseluruhan luas wilayah Propinsi DIY. Topografi Kabupaten Bantul terbagi dalam dataran rendah 40% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur. Secara garis besar, Kabupaten Bantul bagian barat, adalah daerah landai yang kurang subur serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (atau seluas 17,73 % dari seluruh wilayah Kabupaten Bantul).⁵⁹

Kabupaten Bantul bagian tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur, memiliki luas hingga 210.94 km² (atau 41,62 % dari luas wilayah Kabupaten Bantul).

⁵⁹ Sumber Data : Disdukcapil Kab. Bantul

Kabupaten Bantul bagian timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian barat, memiliki luas 206,05 km² (40,65%). Sedangkan Kabupaten Bantul bagian selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.⁶⁰

Kabupaten Bantul secara administratif terbagi atas 17 kecamatan, 75 desa, 933 dusun. Luas wilayah ini dihuni oleh penduduk sebanyak 930.276 jiwa, sedangkan kepadatan penduduk yang dihitung dari (Jiwa/km²) sebanyak 2.012,93. Dari keseluruhan penduduknya tersebut, jumlah kepala keluarga di Kabupaten Bantul sebanyak 250.806 kk.⁶¹ Berikut tabel kecamatan, desa dan dusun yang terbagi secara administratif tersebut:

Tabel 2.2

Jumlah Kecamatan, Desa Dusun dan Luas per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km2)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	23,68

⁶⁰ Sumber Data : Disdukcapil Kab. Bantul

⁶¹ Sumber Data : Disdukcapil Kab. Bantul

5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	24,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasih	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
	Jumlah	75	933	506,85

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Bantul

2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Selama kurun waktu tahun (2012-2013) pertumbuhan PAD melalui pajak daerah dengan dikoordinator oleh Bidang Pendapatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penggalian dan peningkatan pendapatan daerah, khususnya dengan tugas pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak dan retribusi daerah telah berhasil meningkatkan pajak daerah yang diperoleh dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sebesar Rp 51,769,224,111,00 sedangkan tahun 2013 sebesar Rp 83.232.017.500,20 dan retribusi

daerah tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sebesar Rp 20,687,723,348,00 sedangkan tahun 2013 sebesar Rp 27.159.864.686,00. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan angka pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2012 dan 2013

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Pajak Daerah	39.922.684.800,00	51.769.224.111,00	64.487.000.000,00	83.232.017.500,20
2.	Retribusi Daerah	19.821.987.200,00	20.687.723.348,00	26.671.104.494,00	27.159.864.686,00

Sumber: Lakip 2012 dan Lakip 2013.

Pertumbuhan pendapatan asli daerah kabupaten bantul menunjukkan Peningkatan tersebut terutama pada realisasi penerimaan pajak daerah yang menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu meningkat sebesar Rp31.463.665.268,70 pada tahun 2013 dari realisasi tahun 2012. Capaian realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2012 dan tahun 2013 sebagai dampak positif dari implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu dengan didaerahkan pajak BPHTB menjadi pajak daerah pada tahun 2011 dan PBB P2 menjadi pajak daerah mulai Januari 2013 Sedangkan realisasi penerimaan retribusi daerah selama tahun 2012 dan tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan

yang positif yaitu bertambah sebesar Rp6.521.187.685,00 pada tahun 2013 dari tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.⁶²

Tabel 2.4
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	REALISASI		PERTUMBUHAN		% PAD	
		TAHUN 2012 Rp	TAHUN 2013 Rp	Rupiah	%	Tahun 2012	Tahun 2013
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166.597.778.028,56	226.400.771.218,22	59.802.993.189,66	35,90	99,63	135,39
1.	Pajak Daerah	51.768.352.231,50	83.232.017.500,20	31.463.665.268,70	61	30,95	49,77
2.	Retribusi Daerah	20.595.098.751,00	27.116.286.436,00	6.521.187.685,00	32	12,31	16,21
3.	Pendapatan Hasil Pengel. Kekayaan Daerah	8.184.263.102,01	9.508.075.666,16	1.323.812.564,15	16	4,89	5,68
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.050.063.944,05	106.544.391.615,86	20.494.327.671,81	24	51,46	63,71

Sumber: Data realisasi tahun 2013 berdasarkan data per februari 2014 (sebelum audit BPK RI)

3. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan tugas, pokok dan tata kerja serta wewenang DPPKAD yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011, DPPKAD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan. Sebagai unsur pelaksana pada bidang pendapatan, DPPKAD berfungsi sebagai koordinator semua sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul.

⁶² LAKIP DPPKAD Tahun 2013 BabIII , hlm. 163

Diukur dalam capaian realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2012 dan tahun 2013 sebagai dampak positif dari implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu dengan didaerahkan pajak BPHTB menjadi pajak daerah pada tahun 2011 dan PBB, P2 menjadi pajak daerah mulai Januari 2013. Bertambahnya realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2013 dari tahun 2012 terutama pada realisasi jenis pajak daerah sebagai berikut:

- a) PBB P2.
- b) Pajak BPHTB.
- c) Pajak Penerangan Jalan.
- d) Pajak Restorant.
- e) Pajak Reklame.
- f) 6 (enam) jenis pajak daerah lainnya.

Bertambahnya realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dicapai tahun 2013 dibanding dengan tahun sebelumnya didukung dengan terlaksananya beberapa kegiatan, adapun upaya/strategi yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Bantul dalam Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian daerah, maka perlunya mengoptimalkan PAD melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pengelola PAD adalah sebagai berikut:

1) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance), dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah yang ada.

Secara umum, proses ini meliputi:

- a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah.
- b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah.
- c. Peningkatan ketaatan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif dengan seluruh SKPD pengelola pendapatan.
- f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

2) Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi daerah.

Proses ini meliputi:

- a. Mendata obyek dan wajib pajak yang belum terdata dan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan, sehingga potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dapat diketahui baik secara kuantitatif maupun kualitatif, antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak daerah yang ada khususnya wajib pajak restoran dan wajib pajak hotel.
- b. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2013 dengan mengoptimalkan pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan melalui:
 - 1) Pelayanan pendaftaran obyek pajak dan mutasi obyek/subyek PBB P2.
 - 2) Pelayanan pembetulan, pembatalan dan salinan atas SPPT/SKPD/STP PBB P2.
 - 3) Permohonan keberatan dan pengurangan atas pajak terutang.
 - 4) Restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah.

- 5) Memberikan kemudahan pembayaran pajak daerah khususnya PBB P2 dengan sistem on line dapat dilakukan di seluruh Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BPD di wilayah Pemda DIY.⁶³

Dalam meningkatkan dan mengoptimalkan PAD Kabupaten Bantul pajak daerah dan retribusi daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD, karena sifatnya pajak daerah dan retribusi daerah hanya boleh memungut apa yang diamalkan oleh daerah, tidak ada upaya lain yang dipungut hanya saja tetap berpacu pada koridor pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

⁶³ LAKIP DPPKAD Tahun 2013 BabIII , hlm. 164-167.

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggungjawab yang diemban juga akan semakin bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah tersebut dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa indikator kinerja yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana suatu daerah.

Indikator keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara langsung kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adapun yang dimaksud kemampuan daerah adalah sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus ketergantungan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Dalam hal ini DPPKAD kabupaten Bantul meningkatkan kinerja dengan melaksanakan kegiatan pengendalian PAD dalam capaian indicator kinerja kegiatan. Tolok ukur keberhasilan kegiatan pengendalian PAD yaitu tercapainya target pendapatan asli daerah

yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp205.407.209.787,07 terealisasi sebesar Rp226.400.771.218,16 yaitu sebagaimana yang ditargetkan dan direalisasi dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD sebagai berikut:

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	TARGET (PERUBAHAN)	REALISASI	SELISIH LEBIH (KURANG)	%
1.	Pajak Daerah	64.487.000.000,00	83.232.017.500,20	18.745.017.500,20	129
2.	Retribusi Daerah	26.671.104.494,00	27.159.864.686,00	488.760.192,00	102
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.508.075.667,00	9.508.075.666,16	(0,84)	100
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	104.741.029.626,07	106.500.813.365,80	1.759.783.739,73	102
JUMLAH		205.407.209.787,07	226.400.771.218,22	20.993.561.431,09	110

Sumber: Data realisasi berdasarkan data per Februari 2014 (sebelum audit BPK RI)

Pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 205.407.209.787,07, terealisasi sebesar Rp 226.400.771.218,22, terdapat selisih dari target sebesar Rp 20.993.561.431,09 atau tercapai 110,22%.

Kontribusi terbesar dari jenis pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul adalah berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 47,04% dan pajak daerah sebesar 36,76%. Kontribusi lainnya berasal dari retribusi daerah

sebesar 12% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,20%.⁶⁴

Kegiatan Pengendalian PAD ini dilaksanakan oleh DPPKAD sebagai koordinator pada bidang pendapatan telah melaksanakan rapat koordinasi SKPD penghasil dalam bentuk rekonsiliasi dan evaluasi atas realisasi PAD. Melalui rapat koordinasi ini pencapaian target PAD yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil dapat diketahui, serta dilaksanakan evaluasi bagi SKPD penghasil dengan target PAD belum tercapai setiap triwulan sesuai dengan target PAD yang diatur dalam Anggaran Kas Kabupaten Bantul. Kegiatan ini juga telah melaksanakan pelatihan pemeriksaan pajak daerah dengan peserta seluruh staf bidang Penagihan, bidang Pendaftaran dan Penetapan. Narasumber pelatihan ini adalah perwakilan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dengan materi kebijakan pemeriksaan pajak daerah, persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan, metode, teknik dan prosedur pemeriksaan serta penyusunan kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Melalui pelatihan ini dapat meningkatkan SDM pengelola pajak daerah.⁶⁵

⁶⁴ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2013 Kabupaten Bantul BabIII, hlm.10-11

⁶⁵ LAKIP DPPKAD Tahun 2013 BabIII, hlm. 53-54

B. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL

1. Gambaran Umum DPPKAD

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (dalam penelitian ini disingkat DPPKAD) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁶⁶

2. Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan pada penelusuran yang peneliti lakukan, visi DPPKAD yaitu "Terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan kekayaan daerah, terbaik se Indonesia".

Harapan yang dikandung dari visi sebagaimana tersebut diatas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah terbaik se-Indonesia selaras dengan tugas, fungsi dan tatakerja yang diemban dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011.⁶⁷

⁶⁶ <http://dppkad.bantulkab.go.id/hal/profil>

⁶⁷ RENSTRA DPPKAD Kabupaten Bantul. Hlm.48

b. Misi

1. Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih responsif;
2. Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas;
3. Pemantapan organisasi berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja.⁶⁸

Pernyataan misi tersebut diatas harus diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga seluruh jajaran pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut berperan serta sesuai dengan beban tanggungjawabnya guna mewujudkan harapan-harapan yang terkandung dalam visi.⁶⁹

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dalam pelaksanaannya, DPPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

⁶⁸ <http://dppkad.bantulkab.go.id/hal/visi-dan-misi>

⁶⁹ RENSTRA DPPKAD Kabupaten Bantul. Hlm.49

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud DPPKAD mempunyai Fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁷⁰

4. Tujuan, Sasaran dan Program

a. Tujuan

Sesuai dengan visi, misi diatas maka tujuan yang ingin dicapai DPPKAD Kabupaten Bantul adalah:

1. Terwujudnya sistem kerja yang professional dengan didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas
2. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah

⁷⁰ <http://dppkad.bantulkab.go.id/hal/profil>

4. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran
5. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, professional dan bertanggungjawab
6. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif
7. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah
8. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi.

b. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran DPPKAD Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responsibilitas pelayanan publik;
2. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas;
3. Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatnya efektivitas APBD;
5. Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah;
6. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif;

7. Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah; dan Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi yang terintegrasi.⁷¹

c. Program

Sembilan program yang dilaksanakan DPPKAD Kabupaten

Bantul yaitu:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD
- h. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- i. Program Pengelolaan Barang Daerah.⁷²

⁷¹ <http://dppkad.bantulkab.go.id/hal/profil>

⁷² LAKIP DPPKAD Tahun 2013 Bab I, hlm. 18-19.

Tabel 2.6

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan DPPKAD 2013

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan perangko/materai
	Pengadaan buku cek
	Pengiriman Surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa listrik
	Jasa Komunikasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat-alat kebersihan kantor
	Terbayarnya tenaga pembersih
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan berbagai alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Macam
	lembar/buku/unit
	penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah
Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan berbagai mebelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung Pemda yang belum

	dipergunakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (63 kendaraan dinas)
	BBM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Perbaiki mebeleur yang rusak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaiki peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terikutinya kursus singkat & bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Sistem Manajemen Mutu	Penyempurnaan SMM
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	
Pemeliharaan Basis Data PBB	Daftar Hasil Rekaman (DHR) PBB
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (WTP : 1 dan WDP : 2)
	Prosentase penyerapan anggaran (belanja daerah) sesuai dengan alokasi
	Prosentase SKPD yang menerapkan Standar akuntansi Pemerintah
	Derajat Desentralisasi
	Prosentase Kemampuan Keuangan Daerah
	Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Penyusunan Analisa Standar Belanja	Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB)
	Penggandaan modul ASB
Penyusunan Standar Satuan Harga	Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi

	Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati
	Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
	FGD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
	Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
	Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
	Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Pendapatan bunga deposito
	Rekonsiliasi dengan Bank terkait penyetoran bunga deposito ke Kas Daerah

Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Penghargaan Pajak)	Intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan
	Sosialisasi melalui mass media
	Study komparasi dalam rangka pemutahiran data piutang PBB
	Mempercepat pemasukan pendapatan dari PBB P2
Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati
	Penggandaan DPA/DPPA SKPD
Penyusunan Anggaran Kas	Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar
	Penggandaan anggaran kas
Penerbitan SPD	Jumlah SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran
	Digandakan SPD
Penerbitan SP2D	Prosentase penerbitan SP2D
Pencetakan Daftar Gaji	Tercetaknya daftar gaji per unit kerja
	Bulan
	Install aplikasi SIM Gaji
	Study Komparasi
Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D	Prosentase Penyelesaian Pengujian atas SP2D yg diajukan
TPTGR	Laporan Majelis TPTGR
	Rakor pemulihan kerugian daerah (Tim Majelis TP TGR)
	Studi Komparasi
Penyusunan Neraca Dinas Instansi	Neraca bulanan SKPD
	Draf Neraca Kompilasi per-31 Desember 2014
	Coaching clinic
Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD	Rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah yang dilaksanakan setiap bulan
Pengelolaan Dana Perimbangan	Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat
	Laporan penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi
	Pendapatan dana transfer
Penyusunan SPT Tahunan	SPT masa akhir bulan
	Form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPH ke KPP
Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan	Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang <i>diupdate</i> setiap bulan

	Laporan Semesteran	
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD	Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati	
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku	
Operasional Pajak Daerah	Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah	
	Penindakan papan reklame yang tidak berijin dan jatuh tempo	
	Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak	
	Pengendalian dan pengawasan PJU	
	Validasi data BPHTB	
Penyusunan Laporan Semesteran	Laporan semester I & prognosis semester II serta digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku	
	Penggandaan	
Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah	Informasi tentang keuangan & aset daerah dalam bentuk buku saku, buku analisa, leaflet	
	Website DPPKAD	
Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)	Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP	
	Intensifikasi PPh ps 21	
	Peserta intensifikasi PPh ps 21	
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkejinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)	
Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD	Prosentase tersalurnya belanja tidak langsung PPKD	
	Prosentase tersalurnya pengeluaran pembiayaan	
	Rekonsiliasi dengan SKPD Penanggungjawab Teknis	
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan	Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan	
	Terlaksananya study komparasi (pembuat neraca)	
Penerbitan SKPP	Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas	
Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS	Rekonsiasi dengan Bapertarum dan BPJS	
	Pelaporan atas potongan IWP	
	Pelaporan atas potongan Taperum	
	Pelaporan BPJS	
	Pelaporan atas potongan PPh pasal 21	
Rekonsiliasi Belanja SKPD	Pencocokan data belanja SKPD dengan data belanja DPPKAD	
	DTH dan RTH	

Pengkartuan Gaji PNS	Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan (seluruh PNS/CPNS se Kab. Bantul)
	Rekonsiliasi data PNS/CPNS dengan BKD
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	Evaluasi atas pelaksanaan SOP dan tersusunnya SOP
Pengelolaan SIMKEUDA	Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah
	Pendampingan penyusunan pelaporan keuangan daerah dengan SIMDA Keuangan Daerah
	Pengadaan Harddisk server dan ram
Pengendalian PAD	Mendukung tercapainya target PAD
	Pelatihan pendaftaran, pendataan dan penilaian PBB
Optimalisasi Pendapatan Daerah	Pencocokan data pendapatan asli daerah dengan SKPD penghasil dan evaluasi atas pencapaian target PAD
	Mendukung tercapainya target PAD
Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah
	Cetak Blangko
	Cetak karcis pajak mineral bukan logam dan batuan
	Sticker WP belum berijin
	Mendukung tercapainya PAD dari pajak daerah
	Jumlah
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Penyerahan SPPT secara simbolis
	Mendukung tercapainya pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB P2
	Cetak SPPT PBB
	Pendistribusian SPPT PBB
	Pengadaan software (penambahan software SISMIOP)
Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD	Tertatanya & terdatanya arsip DPPKAD
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah	Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD
	Pelaporan realisasi pendapatan dan belanja daerah (Bank Indonesia, Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan, DPPKA Propinsi DIY dan Badan Statistik)
Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal	Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai
	Sosialisasi kualitas tanaman tembakau (peserta 100)
	Pemasangan baliho
Studi Potensi Pajak Daerah	Kajian Data potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Bantul

Studi Potensi Retribusi Daerah	Kajian data potensi retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bantul
Pengelolaan Arsip Wajib Pajak	Tertatanya wajib pajak PBB dan BPHTB
	PBB dan BHPTB
Pendataan PBB P2	Validitas Database PBB P2(desas)
Verifikasi Piutang Daerah	verifikasi piutang daerah
	Study komparasi dalam rangka pemutahiran data piutang
Pendataan dan penetapan wajib pajak	Mendukung tercapainya pendapatan asli daerah dari pajak daerah
	Jumlah Wajib Pajak Baru (diluar BPHTB dan PBB)
	BPHTB
Pengelolaan Arsip Wajib Pajak	Prosentase tertatanya arsip Wajib Pajak
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman pengelola keuangan SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku
Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD	Pembinaan kepada pengelola keuangan SKP
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya aturan pengelolaan keuangan, pajak daerah dan retribusi daerah
Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
	Study komparasi
Regulasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah	Tersusunnya Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Bantul
Program Pengelolaan Barang Daerah	Prosentase keakuratan data barang milik daerah
Peningkatan SDM aparatur Pemda	Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah
	Study komparasi pengurus barang
Simbada	Terlaksananya penatausahaan BMD (Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB)
	Pengelolaan BMD dengan Simda BMD
Sensus barang daerah	Akurasi data BMD (selain SD dan UPT)
Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang	Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBM, DKBMD, DKPBM)
	Laporan mutasi barang milik daerah
	- SKPD
Penataan asset	Keputusan Bupati

	Perjanjian	
	Berita Acara	
Penghapusan barang daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	
	Penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai	
Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran)	
	- SKPD, SMP/SMK, dan UPT	
Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD) Tahun 2015	
	SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2014	
Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja	
	Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)	
Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah	Kemauan dokumen pemilikan BMD	
	Pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas	
Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD	Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang	
	Study banding	
Penyusunan Buku Kerja dan Kalender	Profil Kabupaten	

Sumber: Capaian Kinerja DPPKAD Triwulan I

5. Bagan Struktur Organisasi

Susunan organisasi DPPKAD Kabupaten Bantul, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 17 Tahun 2011, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Program; dan
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan terdiri atas :

- Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan;
 - Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan
 - Seksi Penetapan.
- d. Bidang Bidang Penagihan, terdiri atas :
- Seksi Penagihan dan Piutang;
 - Seksi Keberatan; dan
 - Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan.
- e. Bidang Bidang Anggaran, terdiri atas :
- Seksi Perencanaan Anggaran; dan
 - Seksi Pengendalian Anggaran
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
- Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
 - Seksi Belanja Langsung
- g. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
- Seksi Pembukuan; dan
 - Seksi Pengolahan Data dan Laporan;
- h. Bidang Aset, terdiri atas :
- Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;
 - Seksi Penilaian dan Optimalisasi; dan
 - Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional.⁷³

⁷³ <http://dppkad.bantulkab.go.id/ha/organisasi>